



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

# KAJIAN FISKAL REGIONAL

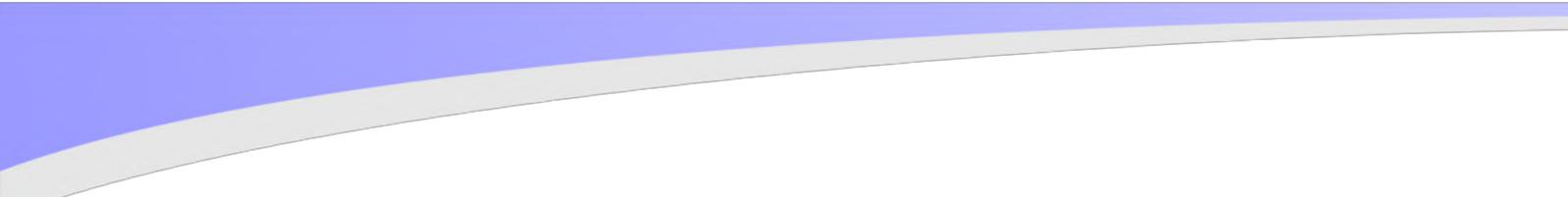


Triwulan I  
2018

Penyusun:  
Penanggung Jawab : Ade Rohman , Ketua Tim : Sudirman  
Editor : Dody Prihardi  
Anggota : Pierra Santos H L T, Cholid, Alfian Taufiqurrizqi  
Elva Anita, Yulianis, Eka, Ida, Gusniwati

**KANWIL DITJEN  
PERBENDAHARAAN**

**Provinsi Sumatera Barat**



---

# **KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

**TRIWULAN I 2018**





# Kata Pengantar

**Ade Rohman**  
*Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi Sumatera Barat*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan *flash report* Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2018 dengan baik, dengan harapan KFR ini dapat menjadi sarana untuk membangun komunikasi dua arah dalam bentuk pertukaran data dan informasi antara Kementerian Keuangan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi Pemerintah Daerah di Sumatera Barat dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi bagi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*Flash report* KFR Triwulan I Tahun 2018 merupakan *output* Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II yang merupakan representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai pengelola fiskal.

Selain itu, *flash report* KFR Triwulan I Tahun 2018 disusun untuk mengetahui sekilas implementasi kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta implikasinya terhadap perkembangan makroekonomi regional. Dengan demikian, para pemangku kepentingan seperti penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, masyarakat, dan investor dapat memperoleh informasi yang strategis untuk merumuskan dan merencanakan kegiatan di masa yang akan datang dengan lebih baik. Hal ini diharapkan memberikan manfaat demi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perlu disampaikan bahwa beberapa aspek kajian yang menjadi titik bahasan utama dalam *flash report* KFR triwulan I Tahun 2018 meliputi perkembangan indikator ekonomi regional, perkembangan dan analisis pendapatan Pemda se-Sumatera Barat, perkembangan dan analisis belanja Pemda se-Sumatera Barat, dan perkembangan Badan Layanan Umum, serta kondisi fiskal regional terkini. Selain itu, secara tematik, membahas tentang berita fiskal regional yang terpilih.

Kami sungguh menyadari bahwa kajian yang kami sampaikan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik maupun saran dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan kajian fiskal regional ini.

--- \*\*\* ---

***Halaman ini sengaja dibiarkan kosong***

# Daftar Isi

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

<b>I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....</b>	<b>- 1 -</b>
A. Produk Domestik Regional Bruto.....	- 1 -
B. Inflasi.....	- 3 -
C. Indikator Ekonomi Lainnya .....	- 4 -
D. Indikator Kesejahteraan.....	- 5 -
<b>II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN.....</b>	<b>- 6 -</b>
A. Pendapatan Negara.....	- 6 -
B. Belanja Negara.....	- 9 -
C. Pembiayaan/Investasi Pusat .....	- 12 -
<b>III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD.....</b>	<b>- 14 -</b>
A. Pendapatan Daerah.....	- 14 -
B. Belanja Daerah.....	- 16 -
<b>IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) .....</b>	<b>- 17 -</b>
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) .....	- 17 -
B. Pendapatan Konsolidasian .....	- 18 -
C. Belanja Konsolidasian .....	- 19 -
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam PDRB .....	- 21 -
<b>V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....</b>	<b>- 22 -</b>
A. Pembangunan Kereta Bandara Minangkabau - Padang .....	- 22 -
B. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepulauan Mentawai .....	- 22 -

***Halaman ini sengaja dibiarkan kosong***

## I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

### A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) Triwulan I tahun 2018 hanya mencapai 4.71 persen dengan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp55,41 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp39,53 triliun. Dibandingkan kondisi nasional, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I tahun 2018 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional yang mencapai 5.06 persen (Y on Y). Selanjutnya apabila dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Sumbar triwulan I tahun 2018 mengalami kontraksi sebesar 0.84 persen (Q to Q).

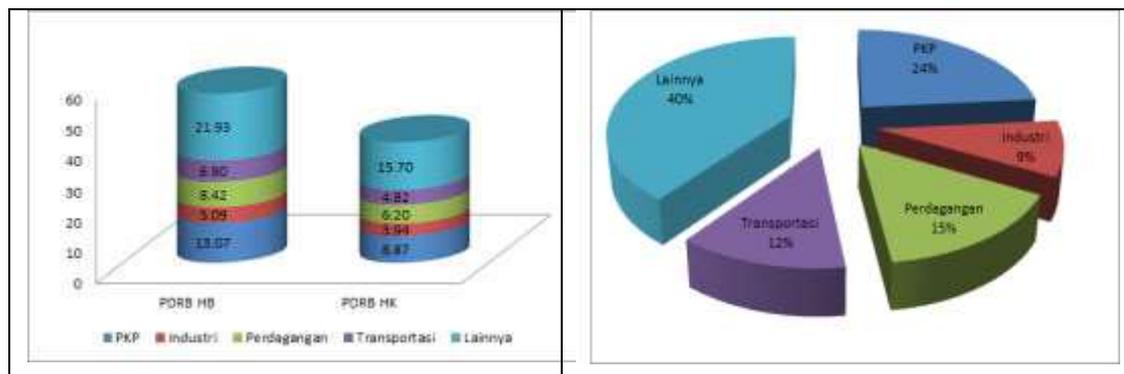
Grafik 1.1. Pertumbuhan ekonomi PDRB Sumbar per triwulan (Y on Y)



Sumber: BPS, diolah

Dilihat lebih dalam, terkait pertumbuhan dan struktur PDRB, kontribusi terbesar PDRB masih bersumber dari Pertanian, Kehutanan, Perikanan (PKP) yang mencapai 23,59 persen dari total PDRB, diikuti sektor Perdagangan dengan besaran 15,20 persen, dan transportasi & Pergudangan 12,46 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I 2018 dibanding periode sebelumnya tahun 2017 (4.91%) didorong oleh beberapa sektor yang melambat dan berkontraksi. Sektor PKP yang menjadi sektor fundamental dalam ekonomi Sumbar hanya berkontribusi 0.54%. Peristiwa yang mendorong melambatnya pertumbuhan ekonomi yaitu adanya pergeseran musim tanam pada sektor pertanian, dan rendahnya produksi CPO dikarenakan tanaman sawit sudah kurang produktif.

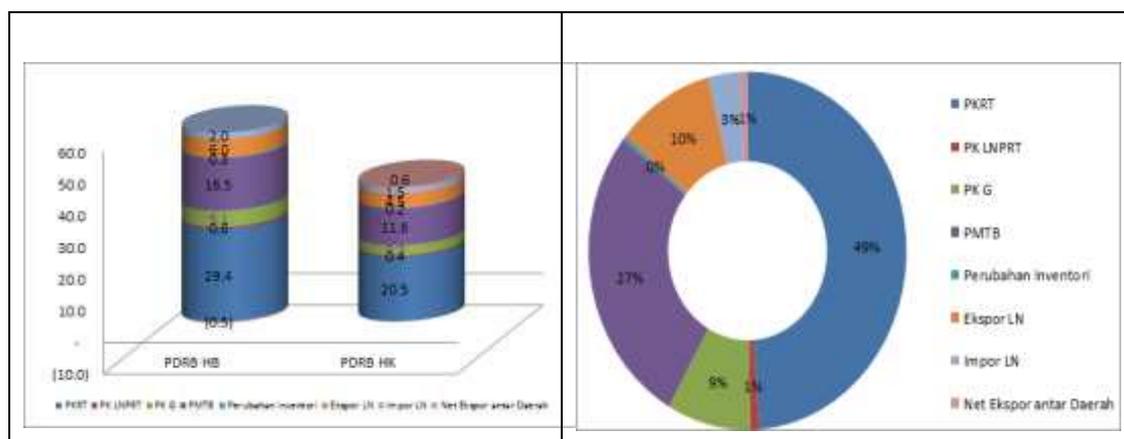
Grafik 1.2. PDRB Sumbar Triwulan I Tahun 2018



Sumber: BPS, diolah

PDRB berdasarkan pengeluaran menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih tergantung pada konsumsi rumah tangga dengan distribusi PDRB mencapai 50 persen dan kontribusi pertumbuhan mencapai 2,68 persen. Sebaliknya, ekspor luar negeri mengalami kontraksi yang cukup besar dalam mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi minus 2,62 persen.

Grafik 1.3 Struktur ekonomi PDRB berdasarkan Pengeluaran Sumbar TW I 2018



Sumber: BPS, diolah

Berberapa catatan peristiwa ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumbar triwulan I tahun 2018 sebagai berikut:

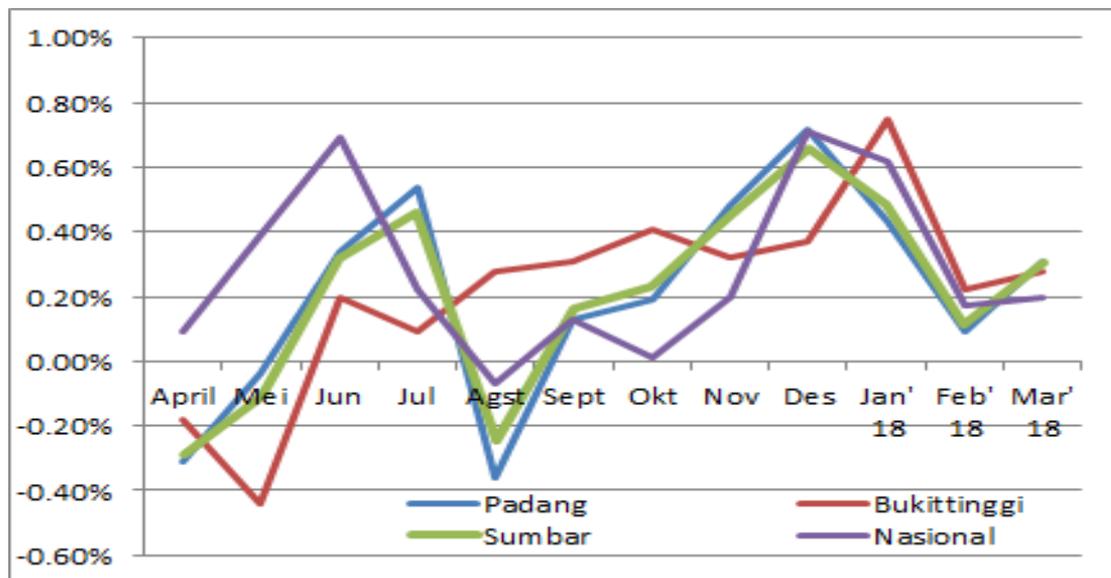
1. Kenaikan konsumsi pada kelompok perabot, peralatan rumah tangga, komunikasi, dan pendidikan;
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh positif dengan realisasi belanja barang dan belanja pegawai yang meningkat.
3. Pembentukan modal tetap bruto bertumbuh disertai dengan realisasi pertumbuhan kredit investasi, serta realisasi belanja modal pemerintah

4. Kontraksi selanjutnya terjadi pada ekspor, dikarenakan menurunnya produksi CPO yang mendorong makin melemahnya ekspor lemak dan minyak hewan.

## B. INFLASI

Inflasi Sumbar yang di *proxy* dua kota, yaitu Padang dan Bukittinggi mengalami inflasi yang sangat rendah sepanjang triwulan I tahun 2018 atau  $\pm$  di bawah 1%. Berbeda dengan triwulan I tahun 2017, Sumbar mengalami deflasi namun dengan sangat terkendali yaitu tetap  $\pm$  di bawah 1%. Kondisi inflasi sepanjang triwulan I tahun 2018 lebih banyak didorong oleh kelompok pengeluaran bahan makanan dan kelompok makanan jadi. Untuk kota Padang, komoditas penyumbang inflasi terbesar berdasarkan jenis barang/jasa disebabkan oleh peningkatan harga Mie, Cabai Merah, dan bensin. Sedangkan untuk Bukittinggi, pendorong jenis barang/jasa pendorong inflasi disebabkan oleh cabai merah, belut, dan bensin. Bahan makanan seperti Jengkol juga merupakan penyebab inflasi di kedua kota tersebut.

Grafik 1.4. Inflasi April 2017-Maret 2018



Sumber; BPS, diolah

Dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, terjadi deflasi pada beberapa komponen pengeluaran. Untuk tahun 2018, jenis barang pendorong deflasi juga berasal dari kelompok bahan makanan, seperti gula pasir, bawang merah, dan beras. Sedangkan untuk tahun 2017, deflasi didorong oleh penurunan dua harga kelompok pengeluaran, yaitu bahan makanan, dan kelompok transportasi, komunikasi, dan

jasa keuangan. Untuk kelompok bahan makanan, jenis barang seperti beras, dencis, dan jeruk nipis merupakan penyumbang deflasi tertinggi.

Secara nasional, inflasi tertinggi untuk awal tahun 2018 terjadi di Jayapura, dan deflasi tertinggi ada di kota Tual. Tingkat inflasi Januari sampai Maret 2018 sebesar 0.99%, sedangkan inflasi nasional pada bulan maret 2018 mencapai 3,40 persen (Y on Y).

### C. INDIKATOR EKONOMI LAINNYA

#### Kurs, Suku Bunga, Ekspor Impor, Industri, Dan Perkembangan Jumlah Wisatawan

Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang utama dunia berfluktuasi secara terbatas sepanjang triwulan I tahun 2018. Nilai tukar mata uang Rupiah triwulan I 2018 mulai tertekan dan bergerak pada angka Rp13.224/USD sampai dengan Rp13.725/USD. Tekanan USD terhadap mata uang Rupiah didorong oleh kebijakan *The Fed* (Bank Sentral Amerika) untuk menaikkan suku bunga acuan, dan kebijakan tersebut akan dilanjutkan dengan secara bertahap. Merespon kenaikan suku bunga yang dikeluarkan *The Fed*, Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga setelah terakhir ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur sejak 21 Juli 2016 yaitu pada rate 6.50 persen.

Tekanan terhadap Rupiah belum menunjukkan pengaruh langsung pada perkembangan ekspor Sumbar pada triwulan I tahun 2018. Nilai ekspor Sumbar pada triwulan I tahun 2018 masih menunjukkan pola positif dibanding dengan jumlah impor yang terjadi. Adapun komoditas barang ekspor Sumbar masih berfokus pada komoditas lemak dan minyak hewan/nabati dengan negara tujuan ekspor terbesar adalah Amerika dan India. Sedangkan komoditas impor terbesar adalah bahan bakar mineral yang berasal dari negara Singapura dan Argentina.

Tabel 1.1 Ekspor dan Impor Triwulan I tahun 2017 dan 2018 Sumbar (juta USD)

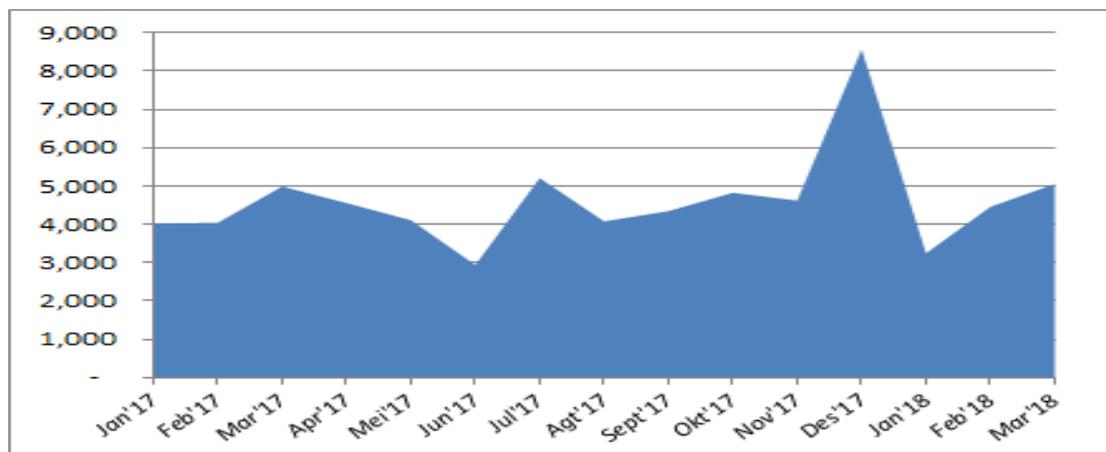
Bulan	2017		2018	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
Januari	179.89	22.63	140,36	62,82
Februari	214.98	27.04	144,92	33,34
Maret	NA	NA	126,33	29,14
<b>Total</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>411.61</b>	<b>125.30</b>

Sumber: BPS, diolah

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi di Sumbar sebagaimana digambarkan sebelumnya masih berfokus pada sektor pertanian. Selain sektor pertanian, sektor lain yang perlu mendapat perhatian adalah industri manufaktur mikro dan kecil dimana pada triwulan I tahun 2018 (y-o-y) tumbuh positif sebesar 1,06 persen. Sebaliknya, produksi sektor industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan I tahun 2018 (y-o-y) tumbuh negatif sebesar 16,27 persen.

Sektor Pariwisata sebagai salah satu sektor yang dicanangkan menjadi salah satu motor pendorong ekonomi Sumbar, bergerak masih berfluktuatif dan bersifat *seasonal*. Jumlah wisatawan selalu mengalami penurunan pada triwulan awal setiap tahun, dan bergerak naik pada triwulan akhir. Untuk triwulan I 2018 pola peningkatan wisatawan juga masih sama. Jumlah wisatawan manca negara (wisman) pada triwulan I mengalami penurunan, yaitu 12.762 wisman atau turun sebesar 2,2 persen dibanding triwulan I tahun 2017. Wisman terbanyak berasal dari Malaysia yang mencapai 92 persen dari total wisman yang masuk ke Sumbar.

Grafik 1.5. Jumlah Wisatawan Mancanegara Sumbar Januari 2017- Mar 2018



Sumber: BPS, diolah

#### D. INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PDRB dari lapangan usaha/sector pertanian merupakan yang terbesar dalam struktur perekonomian Sumatera Barat hingga triwulan I tahun 2018. Dengan mengacu *pada* besarnya sumbangsih sektor pertanian terhadap ekonomi Sumbar, maka indeks kesejahteraan petani merupakan salah satu yang perlu dilihat dalam pertumbuhan ekonomi Sumbar yang biasanya disebut dengan Nilai tukar petani (NTP). NTP Sumbar pada triwulan I tahun 2018 jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017. Adapun gambaran NTP pada triwulan I tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 NTP Sumbar Triwulan I tahun 2017 dan 2018

Bulan	2017	2018
Januari	97.92	95.81
Februari	98.64	95.57
Maret	98.19	94.83
<b>Rata-Rata</b>	<b>98.25</b>	<b>95.40</b>

Sumber : BPS, diolah

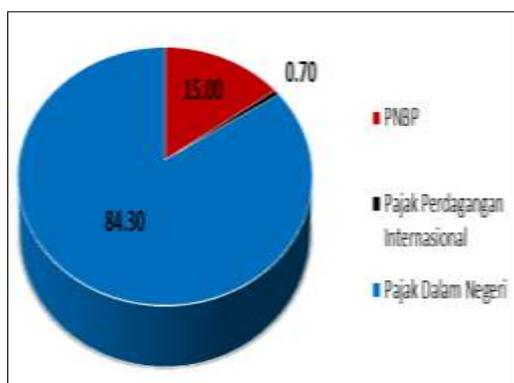
Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tren penurunan daya beli masyarakat petani dengan faktor utamanya lebih dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani. Turunnya indeks harga yang diterima petani secara umum dikarenakan oleh harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan sebesar 1.79 persen dan tingkat penggilingan turun sebesar 1.67 persen pada bulan Maret 2018 dibandingkan bulan sebelumnya.

## II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

### A. PENDAPATAN NEGARA

Pendapatan Negara di Sumatera Barat pada triwulan I tahun 2018 baru mencapai Rp1,26 triliun atau mencapai 17,96 persen dari target yang ditetapkan. Komposisi pendapatan negara yaitu Penerimaan Perpajakan yang mencapai Rp847,26 miliar (14,15 persen dari target tahun 2018) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp418,15 miliar (39,56 persen dari target tahun 2018).

Dilihat dari target Pendapatan Negara di Sumatera Barat, maka komposisi Pendapatan Pajak Dalam Negeri masih sangat tinggi yang mencapai 84,30



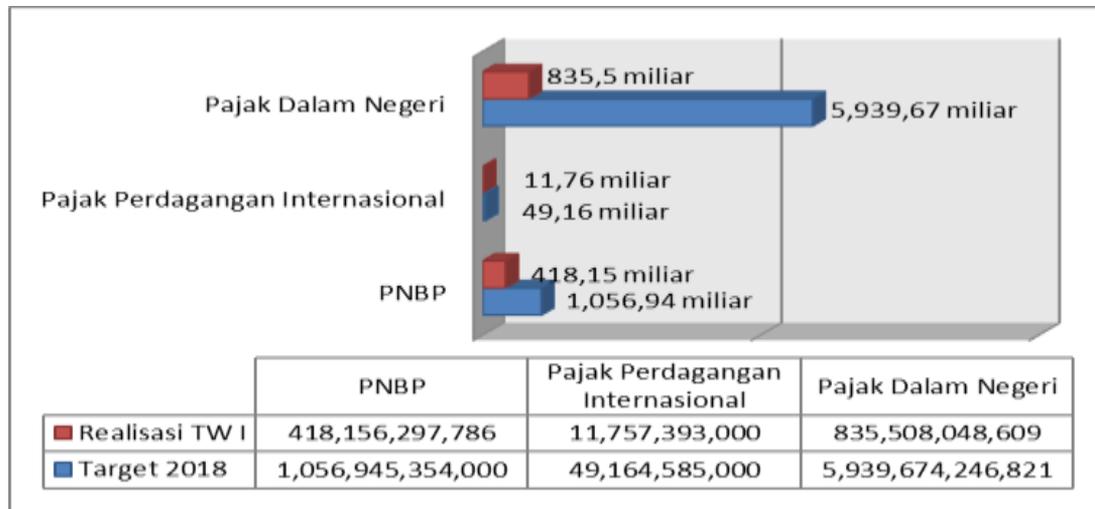
persen, PNPB sebesar 15 persen, dan sisanya berasal dari Pajak Perdagangan Internasional. Ini memperlihatkan bahwa capaian Pendapatan Negara di Sumatera Barat sangat bergantung pada Pajak Dalam Negeri.

Namun demikian sampai dengan triwulan I tahun 2018, realisasi Pendapatan Pajak

yang terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional masih dalam *track* yang bagus. Realisasi Pajak Dalam negeri triwulan I telah mencapai

14,07 persen dan realisasi Pajak Perdagangan Internasional telah mencapai 23,91 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.1 Pendapatan Negara di Sumatera Barat pada Triwulan I Tahun 2018



Sumber : Kanwil Pajak, KPBC, OM SPAN, data diolah

### 1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Sampai dengan triwulan I, hanya realisasi PBB dan BPHTB rendah yang masih dikisaran 3,39 persen dari target. Ini sedikit menggambarkan bahwa pertumbuhan di sektor perumahan di masyarakat di awal tahun 2018 masih cukup rendah. Namun demikian belum cukup menggambarkan pertumbuhan dan berkembangnya sektor perumahan di Sumatera Barat, setidaknya perlu dilihat perkembangannya sampai dengan triwulan III. Di samping itu, realisasi penerimaan PBB baru akan nampak pada triwulan III bertepatan dengan batas akhir pembayaran PBB di akhir bulan Agustus.

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Triwulan I Tahun 2018

No.	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	Target	Realisasi Triwulan III	%
1	PPh Non Migas	3.735.612.384.195	558.505.747.070	14,95
2	PPN dan PPnBM	2.056.787.526.214	257.869.497.657	12,54
3	PBB, BPHTB	48.079.550.000	1.631.183.558	3,39
4	Pajak Lainnya	99.194.786.412	17.501.620.324	17,64
	<b>Total</b>	<b>5.988.838.831.821</b>	<b>847.265.441.609</b>	<b>14,15</b>

Sumber : Kanwil Pajak, OM SPAN, data diolah

Dalam mencapai target Pendapatan Pajak Dalam Negeri ada beberapa permasalahan umum yang selalu menjadi alasan yaitu:

- a) Target yang ditetapkan tidak realistis dilihat dari asumsi makro terutama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat; dan
- b) Kesadaran wajib pajak, kuantitas dan kualitas SDM yang mengelola perpajakan perlu terus ditingkatkan agar upaya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dapat tercapai.

## 2. Pajak Perdagangan Internasional

Target pendapatan dari sektor bea masuk dan bea keluar pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2017. Target bea masuk tahun 2018 sebesar Rp11,86 miliar atau turun 43,81 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai Rp17,06 miliar. Sedangkan target bea keluar tahun 2018 sebesar Rp37,30 miliar atau turun 49,80 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai 55,88 miliar.

Penurunan ini memang agak kontradiktif bila dilihat dari realisasi bea masuk dan bea keluar tahun 2017 yang mencapai 111,07 persen. Penurunan target bea keluar (pajak ekspor) disebabkan pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk tahun 2018 menetapkan tarif bea keluar produk CPO sebesar 0 persen. Sebagaimana diketahui bahwa komoditas utama ekspor Sumbar adalah minyak nabati yang bersumber dari CPO. Sedangkan penurunan target bea masuk karena secara alamiah bea masuk barang impor di Sumbar relatif kecil. Tingginya bea masuk tahun 2017 dikarenakan adanya perusahaan baru yang masih membutuhkan alat produksi yang diimpor dari luar negeri dan di tahun 2018 diperkirakan bea impor akan turun secara signifikan.

Pada triwulan I ini, realisasi bea masuk telah mencapai 57,44 persen atau sebesar Rp6,81 miliar dan realisasi bea keluar telah mencapai 13,25 persen atau sebesar Rp4,94 miliar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.2 Bea Masuk dan Bea Keluar Triwulan I Tahun 2018



Sumber: KPBC Padang, data diolah

### 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dari sektor PNBP, pada triwulan I tahun 2018 realisasi PNBP telah mencapai 39,56 persen atau sebesar Rp418,16 miliar dari target Rp1.056,94 miliar. Pendapatan Badan Layanan Umum baru terealisasi sebesar 31,46 persen atau sebesar Rp283,94 miliar sedangkan realisasi PNBP Lainnya mencapai 86,92 persen atau sebesar Rp134,22 miliar. Diperkirakan tidak terlalu sulit untuk mencapai target PNBP tahun 2018 bila dilihat dari realisasi pada triwulan I ini.

Grafik 2.3 PNBP sampai dengan Triwulan I Tahun 2018



Sumber : Satker BLU, OM SPAN, data diolah

Kontribusi terbesar PNBP berasal dari PNBP Badan Layanan Umum dan PNB Lainnya yang bersumber dari penerimaan instansi vertikal seperti penerimaan dari kepolisian dan kejaksaan atau PNBP sektor Sumber Daya Alam.

## B. BELANJA NEGARA

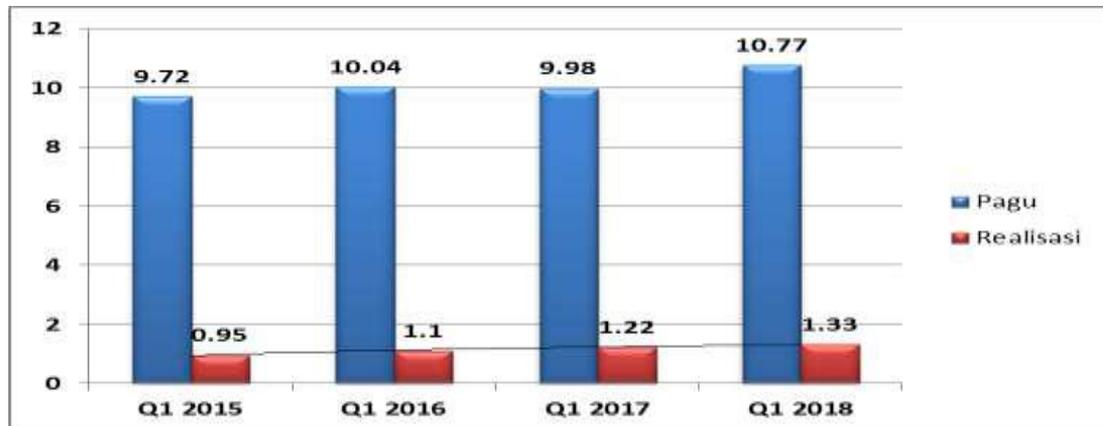
### 1. Belanja Pemerintah Pusat

Alokasi belanja APBN Sumatera Barat dalam 4 (empat) tahun terakhir trendnya mengalami peningkatan yang relatif stabil, kecuali di tahun 2017 yang mengalami penurunan. Namun demikian, penurunan tersebut diimbangi dengan peningkatan belanja transfer ke daerah untuk Sumatera Barat.

Dilihat dari realisasi APBN pada triwulan I tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, trennya mengalami peningkatan yang positif dari kisaran 0,95 triliun rupiah sampai dengan 1,33 triliun rupiah. Secara persentase, realisasi di triwulan I dalam 4 (empat) tahun tersebut masih di kisaran 9,77 persen sampai dengan 12,35 persen atau masih dibawah target realisasi pemerintah pada triwulan I sebesar 15 persen. Untuk

melihat lebih jauh realisasi APBN triwulan I di Sumbar digambarkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.4 Pagu dan Realisasi APBN Sumatera Barat Triwulan I 2015-2018



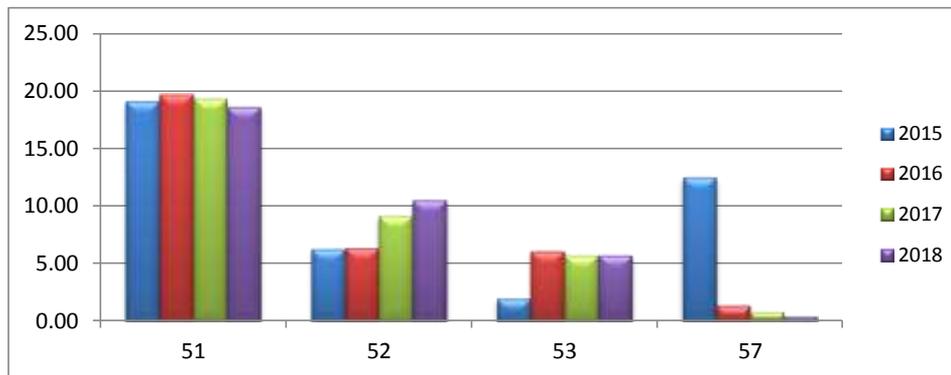
Sumber: [pa.perbendaharaan.go.id](http://pa.perbendaharaan.go.id)

Permasalahan yang selalu menjadi penyebab rendahnya realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses lelang pengadaan barang/jasa yang belum selesai dilaksanakan. Sampai triwulan I banyak yang masih dalam proses lelang dan belum ditetapkan pemenangnya;
2. Langkah-langkah strategi pelaksanaan anggaran yang dicanangkan pemerintah belum sepenuhnya dipahami oleh satuan kerja/kementerian lembaga seperti proses pengadaan barang/jasa yang dapat dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sebelumnya setelah APBN disahkan DPR;
3. Kepatuhan satuan kerja/kementerian lembaga dalam penyampaian data kontrak ke KPPN masih lemah.

Pola penyerapan anggaran per jenis belanja dalam 4 (empat) tahun terakhir beragam. Pada tahun anggaran 2017 dan 2018, belanja barang mengalami peningkatan di level 10 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja modal dalam 3 (tiga) tahun terakhir berkisar diangka 5 persen. Untuk belanja bantuan sosial penyerapan anggaran pada triwulan I dalam 3 (tiga) tahun terakhir sangat rendah antara 0,3 sampai dengan 1.4 persen. Hanya belanja pegawai yang penyerapannya secara umum mencapai 19 persen atau di atas target penyerapan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Grafik 2.5 Persentase Realisasi Perjenis Belanja APBN Sumatera Barat sampai dengan Triwulan I 2015-2018



Sumber: *pa.perbendaharaan.go.id*

## 2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Alokasi anggaran dana transfer ke daerah (termasuk dana desa) tahun 2018 se-Sumatera Barat mencapai Rp20,60 triliun. Sampai dengan triwulan I tahun 2018, realisasi dana transfer ke daerah telah mencapai sebesar Rp7,47 triliun atau mencapai 36,26 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Pagu dan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Triwulan I 2018

No.	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Pagu	Realisasi	%
1.	Dana Bagi Hasil	576.766.417.000	120.460.991.150	20,89
2.	Dana Alokasi Umum	13.525.163.475.000	5.635.484.575.000	41,67
3.	Dana Insentif Daerah	405.250.000.000	202.625.000.000	50,00
4.	DAK Non Fisik	3.565.586.580.000	1.358.882.772.480	38,11
5.	DAK Fisik	1.740.572.013.000	0	0
6.	Dana Desa	790.083.876.000	158.016.775.200	20,00
<b>Total</b>		<b>20.603.422.361.000</b>	<b>7.475.470.113.830</b>	<b>36,29</b>

Sumber : OM SPAN, Simtrada DJPK

DAK Fisik sampai dengan akhir bulan Maret belum ada yang disalurkan. Hal ini disebabkan Pemda belum memperoleh kontrak kegiatan DAK Fisik dari dinas teknis terkait. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat penyaluran DAK Fisik Tahap I adalah daftar kontrak kegiatan disamping Perda APBD, laporan penyerapan dana tahun sebelumnya dan rencana kegiatan DAK Fisik. Namun demikian batas waktu penyaluran DAK Fisik adalah sampai dengan 31 Juli 2018.

Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20 persen dari alokasi Dana Desa telah disalurkan kepada seluruh kabupaten/kota. Di Sumatera Barat terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota penerima Dana Desa. Dana Desa tersebut disalurkan untuk 928 nagari/desa, bertambah 43 nagari dibandingkan tahun 2017. Penambahan tersebut terdapat di Kabupaten Padang Pariaman.

### 3. Badan Layanan Umum (BLU)

Alokasi anggaran lingkup BLU se-Sumatera Barat pada tahun 2018 sebesar Rp1.713,42 miliar atau turun sekitar Rp4,23 miliar dibanding tahun 2017 sebesar Rp1.717,65 miliar. Secara keseluruhan, realisasi anggaran sampai dengan triwulan I baru mencapai 12,28 persen atau masih berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah sebesar 15 persen. Dari 5 (lima) BLU yang ada di Sumatera Barat, hanya BLU Rumah Sakit M. Jamil Padang dengan realisasi di atas target pemerintah yaitu sebesar 17,38 persen. Permasalahan penyerapan anggaran pada lingkup BLU pada umumnya hampir sama dengan satuan kerja/kementerian lembaga pada umumnya. Walaupun pemerintah melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) telah memberikan kekhususan bagi BLU dalam proses pengadaan barang/jasa, namun belum dipahami sepenuhnya dan masih mengalami keraguan dalam pengadaan barang/jasa.

Untuk melihat lebih jelas alokasi dan realisasi anggaran BLU pada triwulan I 2018 di Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Asset, Alokasi dan Realisasi Anggaran BLU se-Sumatera Barat Triwulan I 2018 (dalam miliaran rupiah)

BLU	Aset	Alokasi	Realisasi	
			Nilai	%
RS Stroke Nasional Bukittinggi	295,85	132,00	14,50	10,98
RS Djamil	914,24	536,62	93,22	17,38
Univ. Andalas	2,333,76	505,42	50,73	10,04
Univ. Negeri Padang	1.136,13	381,29	37,05	9,82
IAIN Imam Bonjol	189,38	158,34	14,49	9,15
<b>TOTAL (M Rp)</b>	<b>4,869,36</b>	<b>1.713,42</b>	<b>210,40</b>	<b>12,28</b>

Sumber: BLU, pa.perbendaharaan.go.id, diolah

### C. PEMBIAYAAN/INVESTASI PUSAT

Pada triwulan I tahun 2018, lembaga perbankan di Sumatera Barat telah menyalurkan Kredit Program khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp193,93 miliar yang meliputi 1 (sebelas) sektor ekonomi dari nilai akad yang mencapai Rp1,1 triliun. Penyaluran terbesar pada Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan yang mencapai 57,57

persen dari total Kredit Program yang telah disalurkan. Sedangkan dari sisi Akad kredit, sektor Perdagangan Besar dan Eceran merupakan sektor dengan akad kredit tertinggi yaitu 49,61 persen dari total akad kredit.

Tabel 2.4 Penyaluran KUR di Sumatera Barat Per Sektor Ekonomi Triwulan I 2018

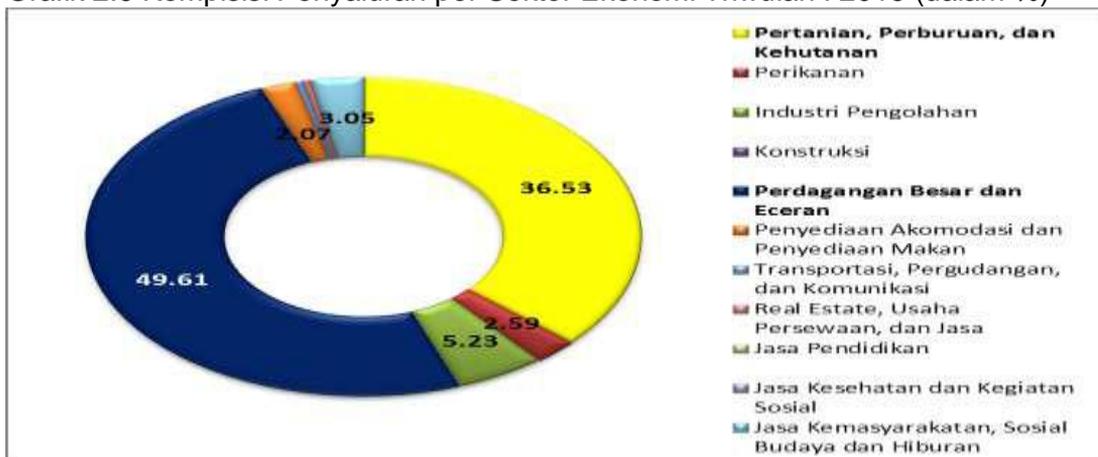
No.	SEKTOR EKONOMI	AKAD			Rata-rata Per Debitur
		Akad	Outstanding	Debitur	
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	401,510,500,000	111,645,464,697	11,209	35,820,358
2	Perikanan	28,486,000,000	6,580,466,795	782	36,427,110
3	Industri Pengolahan	57,452,000,000	3,770,623,472	1,888	30,430,085
4	Konstruksi	225,000,000	225,000,000	10	22,500,000
5	Perdagangan Besar dan Eceran	545,255,726,000	59,995,201,731	17,901	30,459,512
6	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan	22,706,000,000	6,686,747,813	574	39,557,491
7	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	4,759,000,000	1,098,000,000	127	37,472,441
8	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa	4,876,000,000	30,000,000	91	53,582,418
9	Jasa Pendidikan	160,000,000	15,000,000	9	17,777,778
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75,000,000	-	1	75,000,000
11	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya dan Hiburan	33,545,000,000	3,881,995,553	1,477	22,711,578
<b>TOTAL</b>		<b>1,099,050,226,000</b>	<b>193,928,500,061</b>	<b>34,069</b>	

Sumber: SIKP, data diolah

Salah satu karakteristik masyarakat Sumatera Barat adalah menjadikan sektor pertanian dan perdagangan sebagai sumber penghasilan utama. Hal inipun terlihat dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR didominasi oleh 2 (dua) sektor tersebut, yaitu Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menyerap 86,14 persen dari total akad kredit.

Untuk melihat lebih jelas komposisi penyaluran KUR per sektor di Sumatera Barat tergambar pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.6 Komposisi Penyaluran per Sektor Ekonomi Triwulan I 2018 (dalam %)



Sumber: SIKP, data diolah

Permasalahan penyaluran kredit program berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi masih relatif sama dengan triwulan-triwulan sebelumnya, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah kurang berperan aktif dalam menjaring dan memfasilitasi debitur potensial. Kendala pendanaan di Pemda menjadi alasan klasiknya. Padahal dengan adanya kredit program, memacu perkembangan UMKM yang pada gilirannya akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkecil *gini ratio*.
- b. Perlunya sektor-sektor ekonomi baru mendapatkan fasilitas kredit program lebih diutamakan dibanding sektor-sektor jenuh seperti sektor perdagangan besar dan kecil dengan realisasi terbesar padahal sektor ini sudah sangat sulit untuk dikembangkan. Sektor pariwisata yang saat ini cukup berkembang, merupakan salah satu sektor potensial untuk dikembangkan.

### III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

#### A. PENDAPATAN DAERAH

Komposisi terbesar dari target pendapatan Pemda se-Sumatera Barat pada tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai sumber pendapatan masih sangat tinggi. Dari target Pendapatan sebesar Rp26,45 triliun sebesar Rp20,51 triliun berasal dari TKDD atau sebesar 77,54 persen. Persentase TKDD terhadap pendatan Pemda tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017 yang mencapai 76 persen.

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Per Pemda Per Jenis Pendapatan Triwulan I – 2018 (dalam jutaan rupiah)

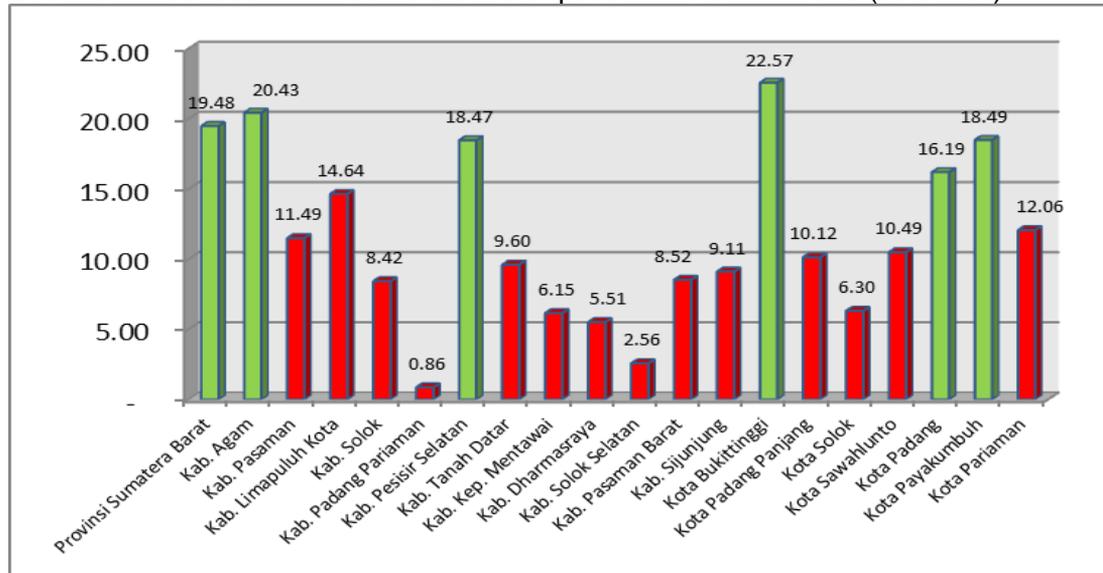
No.	Pemerintah Daerah	PAD		Pendapatan Transfer		Pendapatan Lainnya		Total		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Provinsi Sumatera Barat	2,320,938.90	452,081.23	4,094,485.86	965,152.93	16,472.00	1,040.50	6,431,897	1,418,275	22.05
2	Kab. Agam	106,081.20	21,671.32	1,117,516.11	299,738.78	195,705.74	2.66	1,419,303	321,413	22.65
3	Kab. Pasaman	98,526.15	11,324.53	863,917.52	-	1,000.00	-	963,444	11,325	1.18
4	Kab. Limapuluh Kota	84,798.04	12,415.96	1,022,224.84	281,630.00	179,337.43	-	1,286,360	294,046	22.86
5	Kab. Solok	71,710.97	6,040.32	1,019,711.89	289,199.10	48,535.57	-	1,139,958	295,239	25.90
6	Kab. Padang Pariaman	117,735.86	1,010.42	1,260,475.40	-	71,983.12	-	1,450,194	1,010	0.07
7	Kab. Pesisir Selatan	125,080.49	23,102.60	1,139,128.43	245,651.65	210,285.43	-	1,474,494	268,754	18.23
8	Kab. Tanah Datar	152,110.03	14,595.46	985,569.21	255,557.25	122,953.91	-	1,260,633	270,153	21.43
9	Kab. Kep. Mentawai	59,851.33	3,679.75	874,365.67	210,621.64	15,489.80	-	949,707	214,301	22.57
10	Kab. Dharmasraya	80,085.86	4,409.24	814,216.44	187,482.34	2,200.00	11.78	896,502	191,903	21.41
11	Kab. Solok Selatan	60,000.00	1,537.76	717,913.58	168,734.39	4,200.00	-	782,114	170,272	21.77
12	Kab. Pasaman Barat	102,623.20	8,743.25	1,019,672.09	242,814.88	10,564.80	-	1,132,860	251,558	22.21
13	Kab. Sijunjung	73,319.76	6,675.81	907,710.93	221,425.39	121,401.15	-	1,102,432	228,101	20.69
14	Kota Bukittinggi	99,988.28	22,565.47	585,474.69	152,932.84	12,001.22	-	697,464	175,498	25.16
15	Kota Padang Panjang	140,045.00	14,178.86	462,313.52	32,560.53	25,476.70	-	627,835	46,739	7.44
16	Kota Solok	49,000.00	3,087.60	501,119.06	139,441.66	30,987.91	-	581,107	142,529	24.53
17	Kota Sawahlunto	65,580.29	6,878.80	526,444.55	114,435.03	21,199.29	-	613,224	121,314	19.78
18	Kota Padang	601,248.60	97,357.12	1,471,197.65	396,719.82	255,428.53	-	2,327,875	494,077	21.22
19	Kota Payakumbuh	107,516.37	19,883.84	577,192.00	156,817.14	38,884.14	-	723,593	176,701	24.42
20	Kota Pariaman	39,508.11	4,762.89	546,788.57	153,744.95	-	-	586,297	158,508	27.04
	<b>TOTAL</b>	<b>4,555,748.43</b>	<b>736,002.25</b>	<b>20,507,438.02</b>	<b>4,514,660.32</b>	<b>1,384,106.73</b>	<b>1,054.93</b>	<b>26,447,293.18</b>	<b>5,251,717.51</b>	<b>19.86</b>

Sumber: GFS Sumbar, data diolah

## 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Sumbar sampai dengan triwulan I tahun 2018 mencapai Rp736 miliar atau sebesar 16,16 persen dari target yang ditetapkan. Hanya ada 6 (enam) dari 20 Pemda yang realisasi PAD di atas 15 persen. Pemko Bukittinggi memperoleh realisasi tertinggi sebesar 22,57 persen.

Grafik 3.1 Realisasi PAD Sumatera Barat pada Triwulan I – 2018 (dalam %)



Sumber: GFS Sumbar, data diolah

## 2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, Transfer dari Pemda Lain, dan Bantuan lainnya. Sampai dengan triwulan I, Pendapatan Transfer pemerintah daerah se-Sumatera Barat bersumber dari TKDD telah mencapai Rp4,51 triliun dari alokasi Rp20,51 triliun, atau telah direalisasikan sebesar 22,01 persen. Pendapatan transfer pada 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan 2017 yang mencapai Rp21,32 triliun. Penurunan ini terjadi sebagai akibat penurunan Dana Bagi Hasil dan Dana Desa dengan penjelasan sebagai berikut:

- Target Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 2018 turun menjadi Rp569,30 miliar setelah pada tahun 2017 mencapai Rp3.455,75 miliar. Penurunan ini karena dalam beberapa tahun terakhir realisasi DBH tidak pernah mencapai target bahkan hanya terealisasi antara 50 sampai 60 persen saja;
- Dana Desa untuk Sumbar pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 sebagai akibat perubahan rumusan perhitungan alokasi Dana Desa. Dengan formula baru, tingkat kemiskinan di desa memiliki porsi

yang cukup tinggi terhadap alokasi Dana Desa, sedangkan di Sumbar tingkat kemiskinan tergolong rendah untuk ukuran Sumatera.

Dilihat dari realisasinya, sampai dengan triwulan I realisasi Pendapatan Transfer di Sumbar telah mencapai Rp4,65 triliun atau sebesar 22,70 persen dari target. Hal ini ditopang dengan pencairan DAU, DID dan Dana Desa yang masih sesuai dengan skema yang ditetapkan.

### **3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

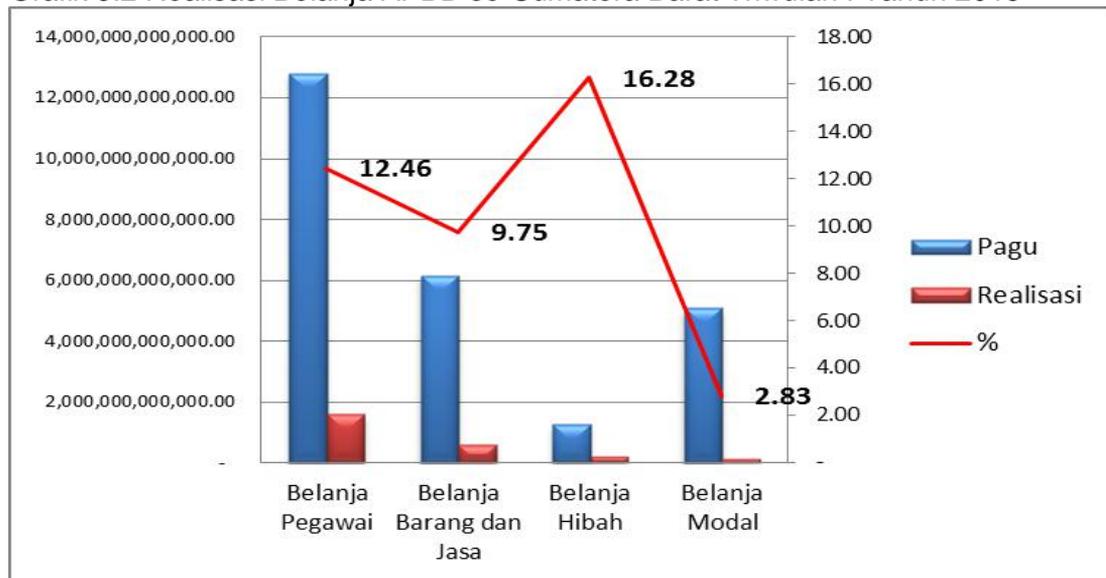
Target Lain-lain pendapatan yang sah dalam APBD se-Sumatera Barat pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup besar dibanding tahun 2017 yang hanya sebesar Rp220,60 menjadi Rp1.384,11 miliar. Peningkatan ini terjadi pada pos hibah baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemda atau lembaga/badan lainnya. Disamping itu target dari pos pendapatan naik mencapai Rp478,69 miliar dari hanya 46,91 miliar pada tahun 2017. Adanya aktivitas pilkada 2018 dan pilpres tahun 2019 disinyalir menjadi salah satu alasan peningkatan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, disamping realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada akhir tahun 2017 yang mencapai Rp1,113,07 miliar.

Namun demikian, sampai akhir triwulan I realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah baru mencapai Rp1,05 miliar yang masih sangat jauh dari target yang ditetapkan. Sampai dengan triwulan III, hibah yang berasal dari kelompok masyarakat dalam bentuk *corporate social responsibility* kepada Pemda belum ada, padahal *instrument* ini berkembang cukup besar di daerah lainnya sebagai bentuk peran serta masyarakat atau *corporate* dalam pembangunan di daerah.

## **B. BELANJA DAERAH**

Komposisi belanja pemerintah daerah terdiri dari Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, dan Transfer ke Pemerintah Kab/Kota atau sebaliknya, serta belanja yang disalurkan ke Desa. Alokasi belanja daerah se-Sumatera Barat tahun 2018 sebesar Rp 27.735,12 miliar atau naik sekitar Rp3.011,82 miliar dibanding tahun 2017. Realisasi belanja sampai akhir triwulan I sebesar Rp2.646.64 miliar atau sekitar masih berada di 9,54 persen. Seperti sudah menjadi kebiasaan, belanja pegawai selalu yang tertinggi dalam penyerapan anggaran, namun sampai triwulan I 2018 belanja hibah telah direalisasikan sebesar 16,28 persen, sedangkan belanja pegawai masih sekitar 12,46 persen. Belanja modal masih merupakan belanja dengan realisasi terendah di triwulan I.

Grafik 3.2 Realisasi Belanja APBD se-Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2018



Sumber: BKAD/BKD, GFS Sumbar, data diolah

Beberapa permasalahan pelaksanaan anggaran yang biasanya terjadi di triwulan I, diantaranya:

1. Adanya beberapa kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan revisi, sehingga pada triwulan I belum dilaksanakan karena masih menunggu proses revisi anggaran selesai dilaksanakan;
2. Proses lelang pada Unit layanan pengadaan yang masih berjalan untuk kegiatan pengadaan pada kegiatan di OPD, dimana pemenang lelang baru ditetapkan sekitar bulan April atau pada triwulan II.
3. OPD terlambat memulai kegiatan pelaksanaan fisik, terutama kegiatan dengan penunjukan langsung yang berasal dari dana DAK, seperti adanya kesalahan juknis dari kementerian/lembaga yang memerlukan penyesuaian.
4. Adanya kegiatan yang bersifat situasional seperti pencairan Jampersal dan Belanja Bantuan Tanggap Darurat dan Belanja Bantuan Sosial sangat tergantung pada kejadian atau proposal yang diusulkan.

#### IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

##### A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN (LKPK)

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumbar sepanjang triwulan I tahun 2017 salah satu faktornya didorong oleh lambatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah. Walaupun ada perbaikan realisasi penyerapan anggaran

dibanding periode yang sama dengan tahun sebelumnya, peningkatan tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya, dari tabel 4.1 di bawah, secara kuantitatif dapat disimpulkan bahwa pendapatan secara konsolidasi daerah sangat jauh dibanding jumlah belanja pemerintah di Sumbar. Dengan demikian, ketergantungan ekonomi daerah secara umum sangat dipengaruhi oleh dana transfer dari pusat. Selain itu, struktur ekonomi dalam PDRB menunjukkan tidak ada perubahan signifikan baik distribusi maupun kontribusi pertumbuhan dari sektor-sektor selain sektor pertanian dan perdagangan.

Tabel 4.1 Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) Triwulan I Tahun 2018 (milyaran rupiah)

Uraian	s.d Triwulan I 2018			Kenaikan (%)	Triwulan I 2017
	Pusat (2)	Daerah (6)	Konsolidasi		Konsolidasi
<b>Pendapatan</b>	<b>1,244.97</b>	<b>884.82</b>	<b>2,130</b>	<b>183.69</b>	<b>750.75</b>
1 Pendapatan Perpajakan	829.03	476.30	1,305.33	215.92	413.18
2 Pendapatan Bukan Pajak	415.94	407.46	823.40	148.52	331.32
3 Hibah	-	1.05	1.05	-83.12	6.25
4 Transfer	-	-	-	-	-
<b>Belanja Negara</b>	<b>1,334.66</b>	<b>2,643.47</b>	<b>3,978</b>	<b>6.70</b>	<b>3,728.21</b>
5 Belanja Pemerintah	1,334.66	2,643.39	3,978	8.18	3,677.31
6 Transfer	-	0.08	0	-99.84	50.89
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>89.69</b>	<b>(1,758.66)</b>	<b>(1,669)</b>	<b>-43.95</b>	<b>(2,977.46)</b>
<b>Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>1,203.26</b>	<b>1,203</b>	<b>149.53</b>	<b>482.22</b>
7 Penerimaan Pembiayaan Daerah		1,230.26	1,230	153.88	484.57
8 Pengeluaran Pembiayaan Daerah		27.00	27	1046.75	2.35
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	<b>89.69</b>	<b>(555.40)</b>	<b>(466)</b>	<b>-81.34%</b>	<b>(2,495.24)</b>

Sumber: LKPK TW I wilayah Sumbar

## B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Total pendapatan konsolidasi yang masuk dalam kelompok penerimaan pajak, PNBPN, dan hibah untuk Triwulan I 2018 Sumbar mencapai Rp 2,13 triliun atau naik secara signifikan mencapai 183.69 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan kenaikan pendapatan pemerintah pusat dan Pemerintah daerah bergerak ke arah yang berbeda. Pendapatan Pemerintah Pusat dari pajak bergerak melambat dikarenakan adanya restitusi pajak yang cukup signifikan di periode triwulan I tahun 2017, sedangkan sebaliknya PNBPN pemerintah Pusat meningkat secara signifikan dikarenakan semakin banyaknya jenis PNBPN yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara khususnya PNBPN

yang bersumber dari pemanfaatan asset-aset pemerintah. Selanjutnya, peningkatan pendapatan perpajakan dan non pajak pemerintah daerah secara signifikan didorong oleh pertumbuhan penerimaan Pemerintah Provinsi Sumbar yang bersumber dari penerimaan pajak kendaraan dan PAD lainnya. Disisi lain, pendapatan Pemda Kab/Kota se Sumbar tidak bertumbuh secara signifikan. Beberapa gambaran dan catatan yang bisa dijelaskan terkait Pendapatan konsolidasi triwulan I 2018 Provinsi Sumbar adalah sebagai berikut:

1. *Tax contribution* Sumatera Barat dengan total penduduk mencapai 5,1 juta pada semester I 2017 mencapai Rp 255.882/penduduk pada triwulan I tahun 2018, dengan *tax ratio* s.d triwulan I 2018 hanya 2.35 persen atau turun pada periode sebelumnya yang hanya mencapai 2.89 persen. Kondisi ini juga sangat rendah dibandingkan dengan *tax ratio* nasional yang mencapai rata-rata 9% (Pendapatan Pajak/PDB).
2. Daerah penyumbang Pendapatan konsolidasi yang bersumber dari jenis pendapatan pajak daerah terbesar atau di atas Rp 10 milyar s.d triwulan I 2017 hanya 3 (tiga) pemda Prov/Kab./Kota, yaitu: Pemda Provinsi Sumbar, Pemkot Bukittinggi, Pemkot Padang. Kontribusi daerah lainnya sangat rendah atau dibawah Rp 10 milyar.
3. Belum ada objek pajak baru yang memberikan kontribusi secara signifikan dalam mendorong penerimaan pajak pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, struktur ekonomi Sumbar yang tidak berubah selama satu dekade terakhir juga menjadi faktor yang membuat penerimaan tidak bertumbuh lebih baik atau lebih cepat
4. Besarnya kontribusi Dana Transfer dan terus meningkatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Transfer dalam struktur APBD juga kurang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara signifikan.

### C. BELANJA KONSOLIDASIAN

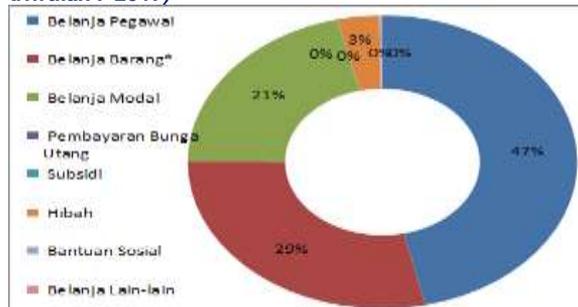
**Alokasi** anggaran belanja pemerintah Pusat pada tahun 2018 di Sumbar mencapai Rp 10,77 triliun dan alokasi anggaran belanja Pemerintah daerah mencapai Rp 25.33 triliun. Alokasi gabungan / konsolidasian belanja pemerintah tahun 2018 mencapai Rp 36.18 Triliun. Dibandingkan dengan tahun 2017, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat mencapai 9,99 triliun, sedangkan alokasi anggaran Pemerintah daerah (20 Pemda Prov/Kab/Kota) mencapai Rp 27,19 triliun, dengan total alokasi anggaran belanja konsolidasian mencapai Rp 37,18 triliun. Dari perkembangan alokasi anggaran konsolidasian tahun 2017 dibanding 2018,

kebijakan pemerintah masih tetap pada kebijakan sebelumnya, yaitu alokasi dana transfer lebih besar dari alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/ Lembaga.

**Realisasi** anggaran belanja triwulan I tahun 2018 untuk pemerintah pusat mencapai 1,33 triliun atau mencapai 12,35% dari total alokasi anggaran, sedangkan realisasi anggaran belanja Pemerintah Daerah secara keseluruhan mencapai Rp 2,64 triliun atau mencapai 10,42%. Dengan demikian, realisasi konsolidasian triwulan I tahun 2018 belanja pemerintah mencapai 11,01 %, atau lebih baik dari realisasi konsolidasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 9,7%. Tidak ada kebijakan baru selain kebijakan mempercepat proses lelang belanja modal sebagaimana kebijakan fiskal pada tahun anggaran 2017.

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, konsentrasi alokasi belanja pemerintah masih berfokus pada belanja pegawai dengan mencapai 47% dari total alokasi, diikuti oleh belanja Barang dan jasa untuk operasional sebesar 29%, diikuti dengan besaran belanja modal 21%. Persentase realisasi belanja pegawai, barang, dan modal tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya walaupun tahun 2018 sedikit lebih baik. Belanja pegawai diharapkan akan meningkat pada triwulan II dan triwulan III pada tahun 2018 seiring dengan realisasi pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 untuk Aparatur sipil negara beserta pensiun. Selain itu, dari sisi kebijakan, pemerintah akan mengupayakan besaran gaji ke-14 tidak hanya mencakup gaji pokok namun juga meliputi tunjangan kinerja pegawai. Kebijakan ini diharapkan akan dapat mendorong daya beli masyarakat sehingga Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dapat mendorong pertumbuhan PDRB lebih baik. Khusus untuk Belanja barang dan belanja modal, penyerapan tidak akan jauh berbeda dengan triwulan sebelumnya, dimana realisasi keuangan belanja akan meningkat secara tajam pada triwulan III dan IV.

**Komposisi realisasi belanja konsolidasi pemerintah triwulan I 2017)**



**Perkembangan Alokasi dan Realisasi belanja LKPK Triwulan I 2017-2018)**



Sumber: LKPK Sumbar, pa.perbendaharaan.go.id, Badan Keuangan Daerah, diolah

**D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PDRB**

Tabel 4.2 Laporan Operasional Triwulan I tahun 2018, diolah (miliaran rupiah)

Uraian	Jumlah	Uraian ( <i>Lanjutan.....</i> )	Jumlah
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,360.76</b>	TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN	-
Pajak	829.77	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	143.76
Kontribusi Sosial	-	Aset Tetap	137.05
Hibah	112.80	Perubahan Persediaan	-
Pendapatan Lainnya	418.18	Barang Berharga	-
<b>BEBAN</b>	<b>3,245.21</b>	Aset Non Produksi	6.71
Kompensasi Pegawai	786.37	Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto	(2,028.22)
Penggunaan Barang dan Jasa	985.13	<b>TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN):</b>	-
Konsumsi Aset Tetap	-	Akuisisi Netto Aset Keuangan	(2,488.98)
Bunga	-	Dalam Negeri	(2,488.98)
Subsidi	-	Luar Negeri	-
Hibah	1,344.44	Keterjadian Kewajiban Netto	15.53
Manfaat Sosial	0.09	Dalam Negeri	15.53
Beban Lainnya	129.18	Luar Negeri	-
Saldo Operasi Bruto	(1,884.45)	<b>SILPA Konsolidasian</b>	<b>476.29</b>
Saldo Operasi Netto 1-2+NOBz)	(1,884.45)		

Sumber: Laporan Stastik Keuangan Pemerintah Sumbar triwulan I 2018, diolah

Besaran belanja pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik yang bersifat jangka pendek maupun yang bersifat jangka panjang. Dari total belanja konsolidasi pemerintah s.d triwulan I 2018 yang mencapai Rp 3,97 triliun tersebut, distribusi belanja pemerintah terhadap PDRB Sumbar mencapai 7,16 % terhadap PDRB Sumbar. Namun demikian, multiplier effect dari belanja pemerintah sangat tergantung pada jenis belanja dan respon pasar terhadap belanja yang disalurkan. Kontribusi belanja pemerintah dalam PDRB diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kontribusi Belanja Pemerintah terhadap PDRB triwulan I 2018

Uraian	2017 (Rp Milyar)
Belanja Konsumsi Pemerintah	3.245,21
Belanja Modal Pemerintah	143,76
Belanja Tanah (-)	(6.71)
Total Belanja Yang dikontribusikan ke PDRB	3.395,68
PDRB Triwulan I 2018 Sumbar	55.410,00
<b>Kontribusi Belanja Pemerintah thdp PDRB</b>	<b>6,12%</b>

Sumber: BPS, LKPK Sumbar, diolah

## V. BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

### A. PEMBANGUNAN KERETA BANDARA MINANGKABAU – PADANG

Pembangunan jalur kereta dari Bandara Minang Kabau ke kota Padang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 dengan panjang 23 kilometer. Pada tahun 2017 telah selesai dilaksanakan pembangunan peron dan fasilitas pendukung di Stasiun BIM dan Stasiun Duku, serta peningkatan dan penyempurnaan pembangunan.



Jalur kereta yang awalnya direncanakan mulai beroperasi September 2017 molor hingga ditargetkan selesai di bulan November 2017, namun kembali ditunda hingga tahun Maret 2018. Penundaan karena menunggu kedatangan railbus. Diharapkan railbus yang diproduksi oleh PT. Inka tidak mengalami keterlambatan lagi dan selesai sesuai rencana.

Dengan pengoperasian kereta api tersebut, akan memudahkan masyarakat dari Kota Padang menuju bandara dan sebaliknya. Ini tentunya akan meningkatkan mobilitas orang dan barang terutama dalam menyambut kunjungan wisatawan dari dalam dan luar negeri setelah Sumatera Barat dinobatkan sebagai “*World Halal Tourism Award 2016*”. Pada gilirannya, hal ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Kereta Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sudah mulai beroperasi perdana mulai 1 Mei 2018, selama 3 (hari) dari tanggal 1 sampai 3 mei pengguna dibebaskan dari tarif kereta dengan kapasitas 393 penumpang ini. Ada empat stasiun pemberhentian, yakni Stasiun Padang, Tabing, Duku, dan Stasiun BIM. Peresmian KA Minangkabau Ekspres yang sudah tertunda beberapa kali ini, rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Presiden RI.

### B. PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DI KEPULAUAN MENTAWAI

Struktur komponen pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sangat tergantung pada lapangan usaha sektor pertanian dan pengeluaran konsumsi RT. Oleh karena itu, pengembangan dari sektor lainnya diperlukan agar tercipta pertumbuhan ekonomi

yang stabil dan berkesinambungan. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar di Sumatera Barat adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Sumatera Barat masih sulit bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia karena kurangnya infrastruktur, fasilitas yang memadai, dan sosial budaya masyarakat. Padahal, kondisi alam dan adat istiadat di Sumatera Barat merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Kepulauan Mentawai, sebagai daerah terpencil dan terluar, merupakan salah satu potensi pariwisata yang sulit untuk berkembang dikarenakan kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Kondisi alam terutama ombak di Kepulauan Mentawai merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara (terutama bagi para peselancar). Untuk meningkatkan potensi Kepulauan Mentawai sebagai destinasi wisata dunia, pemerintah daerah berencana membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mentawai.



Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategic wilayah serta diberikan fasilitas dan isentif khusus sebagai daya tarik investasi. Pembentukan KEK di Indonesia diatur dalam UU no. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Saat ini di Indonesia sudah ada 12 KEK yang tersebar dari barat hingga timur wilayah Indonesia didukung dengan penyelenggaraan infrastruktur pemberian fasilitas dan insentif serta kemudahan berinvestasi.(kek.go.id)

Pembangunan KEK di Kepulauan Mentawai akan dilakukan di atas lahan seluas kurang lebih 2.615 hektar yang berlokasi di Siberut Barat Daya (sumbar.antaranews.com). Di lokasi tersebut, akan dibangun 23 sarana, yaitu bandara, pelabuhan, marina, kantor, taman hiburan dan taman air, museum, pasar

seni, kebun binatang, resort, hotel, apartemen, villa, pemukiman, area komersil, lapangan golf, club house, golf residence, retirement, rumah sakit, sekolah, spiritual tourism, area industri, mess pekerja dan pemakaman. Proyek ini direncanakan akan dimulai tahun 2019 dan diharapkan selesai pada tahun 2021. Saat ini, proyek pembangunan ini berada dalam tahap Analisis mengenai dampak lingkungan yang diharapkan dapat disahkan pada tahun 2018 ini.

Proyek pembangunan dengan skala besar tentunya menjadi kontroversi di kalangan masyarakat terutama soal dampak yang akan ditimbulkan oleh proyek tersebut baik kepada alam maupun terhadap masyarakat di Kepulauan Mentawai. Kajian AMDAL tidak hanya menjadi kunci dalam upaya pembangunan yang akan dilaksanakan, namun kajian antropologi dan sosial harus dikedepankan sebelumnya, Kepulauan Mentawai sebagai cagar biosfer harus dipertahankan alam dan masyarakat adatnya, karena keseimbangan ini sangat rentan dan dapat menimbulkan turunya pesona Kepulauan Mentawai di mata wisatawan manca negara. Kajian Kepulauan Mentawai harus dilakukan secara menyeluruh dan memperhatikan aspek-aspek konservasi, perlindungan penuh satwa dan habitatnya, serta keterlibatan para ahli. Sehingga pembangunan KEK di Kepulauan Mentawai mampu menjawab kebutuhan akses masyarakat dan tidak berdampak pada degradasi sumber daya alam di masa yang akan datang, tidak memicu konflik lahan dan mampu menjadikan Mentawai sebagai destinasi mancanegara dengan mengakomodir kearifan masyarakat setempat (mentawaikita.com).

----- 000 -----

